

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Jakarta, 23 Oktober 2017

**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAMBANG RIANTO, S.STP., M.Si.
2. Jabatan : CAMAT - CIMANGGUNG
3. NHK : 332420
4. Tanggal Pelaporan : 23 Januari 2017

**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK ..... Rp. 1.428.750.000****(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 105 m2 & 170 m2, di Kabupaten SUMEDANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 NJOP Rp.375.000.000
2. Tanah seluas 172,5 m2, di Kabupaten SUMEDANG, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2009 NJOP Rp.603.750.000
3. Tanah seluas 273 m2, di Kabupaten SUMEDANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 NJOP Rp.225.000.000
4. Tanah seluas 84 m2, di Kabupaten SUMEDANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 NJOP Rp.15.000.000
5. Tanah seluas 0 m2, di Kabupaten SUMEDANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2016 NJOP Rp.210.000.000

**B. HARTA BERGERAK****a. ALAT TRANSPORTASI ..... Rp. 310.000.000****DAN MESIN LAINNYA**

1. Motor, merk HARLEY DAVIDSON, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun --- nilai jual Rp.175.000.000
2. Mobil, merk FORD ESCAPE, tahun pembuatan 2005, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun --- nilai jual Rp.125.000.000
3. Alat Transportasi Lain, merk DOORUS, tahun pembuatan 2016, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun --- nilai jual Rp.10.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	..... Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	..... Rp.	0
C. SURAT BERHAGA	..... Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	..... Rp.	0
E. PIUTANG	..... Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	..... Rp.	1.738.750.000
III. HUTANG	..... Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )	..... Rp.	1.738.750.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

